

Prioritas Nasional

Produk Unggulan Tahun 2017

Tata Ruang

Keterangan : Rekomendasi : 61



Pemetaan RTRW dan RZWP3K yang Diintegrasikan



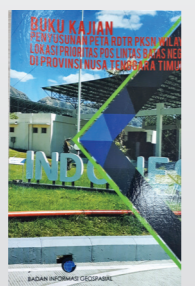
Dukungan Pemetaan Tata Ruang Kawasan Pedesaan



Sistem Informasi Pemetaan Capaian Kegiatan Asistensi <http://tataruang.big.go.id>



Pemanfaatan IG Untuk Mendukung Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Skenario Pengembangan Wilayah



Pemetaan RDTR Wilayah Prioritas PKSN Perbatasan Negara



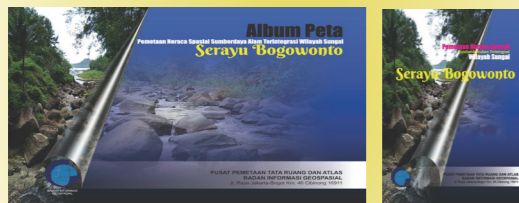
Laporan Eksekutif Status Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang Tahun 2017

- 37 RDTR
- 18 RTRW Kota/Kab
- 3 RTRW Provinsi
- 3 KS Provinsi

Pemetaan Dinamika Sumberdaya



Pemetaan Dinamika Sumberdaya KEK Tanjung Lesung



Pemetaan Neraca Sumberdaya Terintegrasi Wilayah Sungai

ATLAS & Pemetaan Sosial



Peta NKRI



Pemetaan Sosial Wilayah Perbatasan



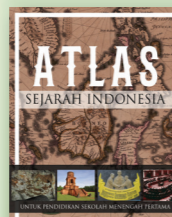
E-Atlas <https://atlas.big.go.id/eatlas1/>



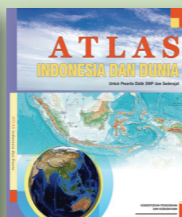
Atlas Taktual



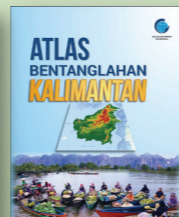
Pemetaan Neraca Sumberdaya Lingkup Kabupaten/Kota



Atlas Pendidikan Kemendikbud



Atlas Bentanglahan



Geotangkas PPTRA



Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pttra_big



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA DAN ATLAS

Memasuki awal tahun baru 2018 hampir seluruh staf PPTRA bahkan mungkin BIG, disibukkan dengan pengisian dan penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Banyak hal menarik dalam pengisian dan penilaian SKP. Salah satu peristiwa menarik terjadi dalam suatu sesi tanya jawab penyusunan SKP terkait kebijakan pembatasan kegiatan. Pertanyaan peserta rapat "apakah keuntungannya bila kita melakukan kebijakan pembatasan sementara kebijakan umum membolehkan?". Respon narasumber mengejutkan, mereka sudah capek atas berbagai ketidaktepatan yang ada yang penting jadi dan sasaran tujuan tercapai. Capek menyikapi waktu adalah sesuatu yang sangat serius apalagi bagi pimpinan.

Waktu adalah sesuatu yang terus bergerak. Ia akan terus bergerak melangkah ke depan walau kita merasa lelah mengikutinya. Kita boleh merasa kecewa ketika harus melalui kehidupan yang tidak menyenangkan tapi inilah realita kehidupan. Marah dan capek yang berkepanjangan tidak akan merubah sesuatu yang telah dibangun dengan tangan sendiri.

Alkisah seorang tukang kayu kerajaan yang biasa kerja teliti dan bagus, sehingga karyanya menjadi terkenal. Suatu saat ia merasa lelah dan ingin berhenti jadi tukang kayu. Lalu ia mengutarakan keinginan tersebut kepada raja

yang selama ini mempekerjakannya dengan harapan mendapat sedikit bekal dari sang raja. Tetapi bukannya diberi pesangon, raja tersebut malah memerintahkan dia untuk membuatkan sebuah rumah sebagai persyaratan sebelum berhenti. Merasa kecewa, tukang kayu itu menerima pekerjaan tersebut dan melampirkan pada pekerjaannya. Ia bekerja seadanya dan tergesa-gesa, ceroboh, dan dari bahan seadanya yang penting jadi atau asal jadi.

Sebuah rumah sederhana yang dikerjakan sekadarnya akhirnya selesai. Tanpa disangka, sang raja ternyata memberikan kunci rumah tersebut kepada sang tukang kayu sebagai hadiah atas dedikasinya yang baik selama ini. Akhirnya tukang kayu hanya bisa menyesali rumah asal jadi yang dikerjakannya sendiri. Demikian pula dengan kita, rumah adalah ibarat program. Dalam menjalankan program terkadang kita lupa bahwa kita sendirilah yang membuat program tak tercapai.

Memasuki tahun 2018, PPTRA telah memilih beberapa staf yang dipandang teladan dan terbaik, yaitu Fuad Hasyim, Roswidyatmoko Dwihatmojo, dan Fakhruddin Mustofa. Dari mereka bertigalah kita semua staf PPTRA harus banyak belajar, KREATIF, PRODUKTIF, DAN THINKING OUT OF THE BOX. Mari kita kembali pada kehidupan normal kita yang keras dan penuh



CATATAN BERANDA

tantangan. Ketika segalanya berubah menjadi mudah dan tanpa tantangan, kita mesti introspeksi barangkali program kita akan menjadi tidak terkendali. Mumpung masih di awal tahun, kita masih diberi waktu untuk mengubah rumah masa depan kita, kita masih diberi waktu untuk memperindah setiap sudut rumah kita. *Bismillahirrohmanirrohim.....Ayo Semangat menyusun rumah baru!* [Mulyanto Darmawan, 2018]

ISU STRATEGIS & INFO KEBIJAKAN

Mengawali tahun 2018 ini, Bappenas telah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait kebutuhan Informasi Geospasial, khususnya Informasi Geospasial dasar (IGD). IGD akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rencana detail tata ruang (RDTR) yang telah dan akan disusun Pemerintah Daerah. RDTR yang menjadi lokasi prioritas (lokpri) adalah yang berada di sekitar Perbatasan Negara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Untuk itu IGD diarahkan dapat memenuhi kebutuhan wilayah prioritas tersebut. Penyediaan IGD pada dasarnya merupakan amanat RPJMN, untuk mendukung arah kebijakan dan strategi tata ruang.

Kebutuhan IGD tahun 2018 sudah teridentifikasi di wilayah PKSN Lokpri Perbatasan. Lokasi tersebut meliputi 24 lokasi yaitu PKSN Lokpri Ketungau Hulu, Jagoi Babang, Bikomi Utara, Kafemenanu, Teluk Mutiara, Krayan, Longpahai, Kayan Hulu, Tanimbar Selatan, Simanggaris, Atambua, Pulau-pulau Aru, Tahuna, Wetar, Sota, Sorong Barat, Amfoang Timur, Alor Timur, Daruba, Sanggowo, Berebre, Jayapura Utara, Marore, Miangas, Nanusa, dan Tanah Merah. Sedangkan untuk RDTR sekitar KEK dan KI terdapat sebanyak 5 lokasi yaitu KEK MBTK, KEK Morotai, KI Sei Mangkei, KI Morowali, dan KI Bantaeng. Sedangkan data dari Kementerian ATR/BPN terdapat sebanyak 49 lokasi

RDTR yang berada di sekitar perbatasan negara dan perlu didukung pengadaan petanya, baik IGD maupun IGT. Diharapkan BIG dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

Terdapat sekitar 165 RDTR dari data pemerintah daerah yang perlu dipercepat dengan skema bantuan teknis Pemerintah Pusat. Bagi daerah yang memiliki Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) diprioritaskan untuk dipercepat. Pada tahun 2018 Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG telah mengalokasikan program untuk percepatan 100 RDTR dan 50 RTRW kabupaten/kota. Daerah yang akan dilayani adalah yang sudah tercatat pernah melakukan asistensi ke BIG. Bantuan teknis dirancang untuk mempercepat penyelesaian peta rencana dan album peta rencana tata ruang sehingga rekomendasi perpetaan dari BIG dapat dikeluarkan.

Adanya koordinasi antara kementerian lembaga yang terkait, khususnya BIG dan Kementerian ATR/BPN, diharapkan secara signifikan dapat mempercepat penyelesaian RDTR kabupaten/kota sampai pada tahap pengesahan peraturan daerah. Untuk tahun 2019, dari hasil rapat tersebut secara tentatif sudah teridentifikasi kebutuhan IGD untuk beberapa wilayah yang akan disusun RDTR nya. BIG dalam hal ini menjadi bagian penting dalam pengalokasian anggaran pemetaan skala detail. [Ryan Pribadi, 2018]

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| Editor: Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Randhi Atiqi, Marhensa Aditya Hadi, Chintia Dewi, Rakyana Paksi, Rochmad Budi S., I Made Dipta S. | Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

BIG Serahkan Surat Rekomendasi Revisi Peta RTRW Provinsi Gorontalo



Penyerahan Surat Rekomendasi

Rabu, 17 Januari 2018 menjadi hari yang membahagiakan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bagaimana tidak, pada hari tersebut BIG melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi untuk Revisi Peta RTRW Provinsi Gorontalo. Terhitung sejak April 2017, Pemerintah Provinsi Gorontalo secara rutin melakukan proses asistensi dan supervisi di PPTRA hingga akhir Desember 2017. Proses sidang pleno berjalan lancar, disusul dengan penyerahan surat rekomendasi dari

Kepala PPTRA, Mulyanto Darmawan, kepada Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Budiyo Sidiki. Penyerahan Surat Rekomendasi Revisi Peta RTRW ini disaksikan langsung oleh Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, dan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Proses asistensi dan supervisi berjalan dengan lancar, baik dari segi perolehan data, perbaikan, hingga koordinasi di daerah. Sesuai standar penyusunan RTRW, data-data yang digunakan dalam proses penyusunan ini cukup lengkap dan bersumber pada walidata yang terkait seperti Peta Rupabumi, Peta Batas Wilayah, Peta Kawasan Hutan, Peta Rawan Bencana, dan data terkait lain misalnya data citra SPOT. Secara perbatasan, Revisi Peta RTRW Provinsi Gorontalo sudah mematuhi kaidah kartografis dan benar secara geometris. Dari sisi substansi juga mematuhi aturan hukum yang ada misalnya terkait penetapan kawasan lindung sebanyak 30% serta penetapan sempadan sungai atau sempadan pantai.

Potret Kegiatan

Saat ini, sebagian wilayah Provinsi Gorontalo juga sedang melaksanakan proses revisi RTRW kabupaten/kota, misalnya Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Dua wilayah tersebut sudah melakukan asistensi sesuai dengan amanat PP No 8 Tahun 2013. Wilayah lain di Gorontalo juga sudah melakukan asistensi dan supervisi terutama untuk penyusunan RDTR. Total berjumlah 16 Bagian Wilayah Perkotaan RDTR yang masuk dalam basis data asistensi.

Penyerahan surat rekomendasi Peta Revisi RTRW Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, peta ini menjadi acuan bagi provinsi/kab/kota lain untuk segera menyelesaikan Peta RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota serta RDTR-nya. [Chintia Dewi, 2018]



Foto Bersama

Menyambut Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Lewat Pemetaan Sosial untuk SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan tindak lanjut dari Millenium Development Goals (MDGs). Beberapa tujuan dan target yang belum tercapai optimal dalam program MDGs terutama terkait masalah kesejahteraan manusia, menjadi sasaran dan fokus utama TPB. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya TPB agar tujuan pembangunan 15 tahun ke depan (2016-2019) berhasil sesuai dengan agenda global. Dalam TPB memuat empat pilar utama yaitu pilar sosial, ekonomi, sosial serta hukum dan tata kelola. Masing-masing pilar mempunyai tujuan global, sasaran, serta indikatornya.

Untuk mencapai TPB secara optimal perlu sinergi dan keterlibatan semua pihak mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pihak yang peduli terhadap pencapaian tujuan di atas. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan aksi nyata pemerintah yang perlu didukung oleh semua pihak. Salah satu catatan penting dalam Perpres ini adalah perlunya koordinasi lintas sektor dan dukungan pendataan.

Dukungan berbentuk data menjadi salah satu bagian penting dalam mencapai tujuan dan target TPB. Selain data utama TPB berupa data statistik, dukungan informasi geospasial (IG)/keruangan cukup penting untuk menggambarkan keadaan, ketercapaian tujuan wilayah, maupun proyeksi ke depan wilayah-wilayah Indonesia. IG juga dapat menjadi baseline awal dari TPB yang masih pada tahap tahun-tahun/periode awal. Data ini dapat diperbandingkan dengan keadaan TPB pada periode ke depan, misalnya pada tahun 2020, 2025, sampai pada puncaknya pada tahun 2030 dimana target-target TPB harus selesai secara optimal.

Badan Informasi Geospasial melalui Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial mempunyai peran strategis untuk mendukung tujuan dan target TPB karena ada banyak hal dari TPB yang fokus pada masalah sosial ekonomi. Dukungan data geospasial dari BIG dan data pemangku kepentingan cukup vital terutama pada aspek pemetaan indikator-indikator TPB dan aspek lain yang terkait. Pada tahun 2018, bidang Atlas dan Pemetaan Sosial akan mendukung implementasi Perpres No. 59 Tahun 2017 melalui aktivitas pemetaan sosial untuk mendukung salah satu program TPB yaitu pengentasan kemiskinan. [Fakhrudin M, 2018]

Komitmen dan Dukungan BIG dalam Pengembangan KEK Tanjunglesung



Penyerahan Produk Ke Bappenas

Arah kebijakan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RPJMN 2015-2019 adalah pengurangan kesenjangan antar wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah. Salah satu pendekatan kewilayahan yang digunakan adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK Tanjunglesung satu dari sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), menurut amanat PP Nomor 58 Tahun 2017 merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Banten dan sekitarnya.

Pemetaan Dinamika Sumberdaya KEK Tanjunglesung melihat seberapa besar pengaruh kebijakan pembangunan KEK terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui analisis perubahan pemanfaatan lahan. Kajian dinamika sosial yang dilakukan saat ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan lahan akan berdampak terhadap perkembangan wilayah. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi integrasi pemanfaatan data antar sektor. Hal ini sejalan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas nasional. Pendekatan THIS mengedepankan penanganan menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Keterpaduan seluruh kegiatan dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional akan memudahkan proses integrasi dan pemantauan. Peran IG dalam perencanaan pembangunan telah merubah paradigma pendekatan sektoral menjadi pendekatan yang lebih tematik, holistik, integratif, dan spasial. Salah satu bentuk komitmen BIG dalam mendukung pengembangan KEK Tanjunglesung

RESENSI

IRONI NEGERI KEPULAUAN Musuh Abadi Kita Adalah Apatisme, Perjuangan Sejati Adalah Membangun Kesadaran

Bahwa kemiskinan rakyat Indonesia yang hidup di bumi dengan kekayaan melimpah ini bukan karena sesuatu yang sifatnya "given", sebuah takdir yang merupakan ketentuan Tuhan. Tapi karena ada orang-orang "jahat" yang serakah yang dengan kekuasaan mereka miliki, mereka menguasai dan memonopoli kekayaan alam itu". Petikan kalimat tersebut merupakan bagian dari ungkapan kegelisahan yang disampaikan penulis dalam pengantar bukunya.

Penulis juga menyampaikan harapannya bahwa buku yang ia tulis dapat menjadi salah satu pemicu bagi pencerahan kita sebagai bangsa, sebagai bentuk kritik dan sumbangsih untuk kebaikan dan perubahan, yakni penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, mendorong kepemimpinan yang kuat, yang berpihak kepada rakyat kecil agar tercapai keadilan sosial dan ekonomi, bukan hanya sekedar slogan yang meninabobokkan. Selain menyampaikan kegelisahan yang dikemas dalam bentuk kritik dan juga gagasan-gagasan, buku ini menjadi menarik karena menguraikan hal-hal yang menyangkut isu-isu permasalahan nasional yang dilengkapi dengan adanya data-data statistik yang valid.

Buku Ironi Negeri Kepulauan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Halaman Kesatu: Negeri Salah Urus, Halaman Kedua: Melawan Ironi Menegakkan Daulat Rakyat, dan bagian terakhir yaitu Penutup. Bagian pertama diulas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa, seperti: Kekayaan Melimpah, Rakyat Hidup Susah, Kekayaan dalam Cengkeraman Asing, Negeri Para Koruptor, Negeri Para Mafia, Ketika Hukum Menjadi Komoditas yang diperdagangkan, Demokrasi Liberal, Demokrasi Pemilik Modal; dan Pemimpin Produk Pencitraan. Sedangkan bagian kedua menguraikan hal-hal tentang: Pemimpin Kuat, Pemimpin yang Dihormati, Demokrasi Sehat, Demokrasi Rakyat, Penegakan Hukum tanpa Pandang Bulu, dan Menjadi Tuan di Negeri Sendiri.

Sementara pada bagian penutup disampaikan gagasan mengenai Resolusi Kaum Muda Indonesia Mengusung Revolusi Kesadaran Kolektif. Pada bagian penutup ini, penulis menawarkan gagasan perubahan untuk perbaikan kehidupan bangsa. Menurutnya faktor utama yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah kepemimpinan yang kuat namun demokratis, pemberantasan korupsi dari hulu hingga hilir, dan posisi kaum muda yang tepat. [Rochmad Budi Santoso, 2018]



Judul Buku : IRONI NEGERI KEPULAUAN
Musuh Abadi Kita adalah apatisme, Perjuangan Sejati Adalah Membangun Kesadaran
Penyusun : Beni Pramula
Penerbit : PT Elex Media Komputindo, Tahun 2015, Jakarta

ini adalah menyampaikan hasil pekerjaan kepada stakeholder terkait. Pada tanggal 21 Desember 2017, BIG menyerahkan hasil kajian Pemetaan Dinamika Sumberdaya KEK Tanjunglesung ke Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian Bappenas. Hasil kajian menyatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun perubahan lahan yang terjadi belum terlalu signifikan. Evaluasi Bappenas terhadap pengelolaan KEK Tanjunglesung masih jauh dari harapan. KEK Tanjunglesung yang dikelola PT. Banten West Java (BWJ) belum mampu mengoptimalkan potensi Tanjunglesung. Padahal KEK Tanjunglesung dianggap sebagai salah satu pilot project pengembangan KEK khususnya KSPN dengan sektor utama pariwisata. Investor masih menunggu kepastian pembangunan infrastruktur. BIG juga telah menyampaikan hasil kajian kepada Bappeda Kabupaten Pandeglang. Saat ini, Pandeglang sedang melakukan peninjauan kembali termasuk mengakomodir proyek strategis nasional pendukung KEK Tanjunglesung. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai salah satu data dukung dalam peninjauan kembali RTRW Pandeglang. [Roswidyatmoko Dwihatmojo, 2018]

BIG Berikan Rekomendasi Peta RTR dan PZ Kawasan Bandara Kulonprogo



Penyerahan Surat Rekomendasi

Di penghujung tahun 2017, pada tanggal 29 Desember 2017, bertempat di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial, diadakan rapat Pleno dalam rangka pemberian surat rekomendasi untuk Peta RTR dan PZ (Peraturan Zonasi) Kawasan Strategis Bandar Udara Kabupaten Kulon Progo. Pleno dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Dr.Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc., dan dihadiri oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

Peta RTR dan PZ Kawasan Strategis Bandar Udara Kabupaten Kulon Progo disusun untuk mengatur tata ruang di sekitar wilayah Bandara baru Yogyakarta yaitu Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hanya berwenang untuk mengatur tata ruang di sekitar wilayah bandara, sedangkan wewenang untuk mengatur area bandara sendiri dipegang oleh PT. Angkasa Pura.

Penyusunan Peta RTR dan PZ Kawasan Strategis Bandar Udara Kabupaten Kulon Progo terbilang singkat. Proses asistensi berlangsung selama 3 (tiga) kali di Yogyakarta pada saat Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Workshop Percepatan Penyusunan Peta RDTR pada bulan September, Oktober, dan Desember. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo cukup terbantu karena telah tersedianya sumber data Citra Satelit Resolusi Tinggi yang sudah terorthorektifikasi oleh BIG sebagai dasar penyusunan Peta RTR. Peta RTR dan PZ Kawasan Strategis Bandar Udara Kabupaten Kulon Progo ini disusun dalam skala detail meliputi Kawasan Inti skala 1 : 5.000 dan Kawasan Penyangga skala 1 : 5.000.

Diharapkan dengan selesainya Peta RTR dan PZ Kawasan Strategis Bandar Udara Kabupaten Kulon Progo dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Yogyakarta khususnya Kabupaten Kulon Progo. Peta ini menjadi acuan dalam mengatur ruang sekitar bandara secara lebih baik yang memperhatikan keseimbangan antara ruang terbangun dan lingkungan sekitarnya. [Suspima, 2018]

PPTRA Siapkan Kerjasama dengan Kemendikbud dan Kemensos



Rapat Draft Kerjasama

PPTRA terus berupaya meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial (IG) di berbagai bidang. Terkait hal tersebut, awal tahun 2018 PPTRA melalui Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial tengah menyiapkan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Sosial (Kemensos). PKS dengan Kemendikbud akan mengatur tentang kerjasama penyusunan peta dan atlas pendidikan bagi siswa SMP. Sementara, PKS dengan Kemensos akan mengatur tentang pemanfaatan atlas taktual bagi penyandang disabilitas netra.

Penyusunan peta dan atlas pendidikan bagi siswa SMP adalah salah satu bentuk dukungan PPTRA terhadap pemanfaatan IG di bidang pendidikan. Peta dan atlas pendidikan dipandang sebagai produk strategis IG karena sifat penggunaannya yang dapat langsung dipakai oleh siswa. Keikutsertaan PPTRA dalam

menyusun peta dan atlas pendidikan juga merupakan salah satu solusi atas banyaknya peredaran produk peta dan atlas pendidikan yang umumnya tidak memenuhi standar dan belum menerapkan kaidah pemetaan yang baik.

Di samping itu, PPTRA juga tengah berupaya lebih gigit agar atlas taktual tersebar secara lebih luas dan masif kepada bagi penyandang disabilitas netra. Sebagaimana diketahui, PPTRA dalam beberapa tahun terakhir secara rutin memproduksi atlas taktual berbasis peta raba yang dilengkapi huruf braille. Atlas tersebut juga telah melalui uji coba keterbacaan di beberapa provinsi sehingga secara kualitas dapat dimanfaatkan. Untuk meningkatkan pemanfaatannya, BIG akan menggandeng Kementerian Sosial untuk membantu menyebarkan atlas tersebut terutama kepada panti sosial yang menampung tunanetra.

Adanya MoU dan PKS antara BIG dengan Kemensos diharapkan dapat mengatasi keterbatasan BIG dalam menyebarkan atlas taktual. Dengan demikian, jumlah penyandang disabilitas netra yang memanfaatkan IG sebagai sumber ilmu akan semakin meningkat. Atlas taktual juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah yang hendak menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan agenda global "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (SDGs), yang mengusung prinsip no-one left behind. [Randhi Atiqi, 2018]